



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PAPUA
DAN
PT MEDIA KHANZA INDONESIA**

Nomor : W.30.HH.01.01 - 03

Nomor : 05-KII/01/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

1. Kuasa Pengguna Anggaran.

: Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua Nomor: W.30-001.KU.03.03 Tahun 2023 tanggal 04 Januari 2023 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua yang berkedudukan di Jl. Raya Abepura Jl. Perkutut No.37, Vim, Distrik. Abepura, Kota Jayapura, Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Tri Ari Wibowo

: Pimpinan Redaksi PT Media Khanza Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Media Khanza Indonesia berkedudukan dan berkantor di Cimuncang Cilik Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut “para pihak”) tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;



2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan PT Media Khanza Indonesia dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua kepada masyarakat luas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / News Konten	FC	1-5 (satu sampai lima) Rilis per hari	PT.Media Khanza Indonesia
Penayangan Iklan Ucapan Hari-Hari Besar Nasional + Hari Besar Terkait Kemenkumham Serta Program Lainnya di Website www.kabarindo.id dengan Slot Article Top dengan Jumlah 1 Slot Per Bulan			

dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di media Cetak.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini PT.Media Khanza Indonesia dilaksanakan dalam dalam tahun anggaran 2023 dengan pembayaran dilakukan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sudah termasuk pajak. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua



PASAL 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
- b. Menyediakan bahan informasi berupa naskah yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau rilis disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- d. Meminta laporan secara periodik dari PIHAK KEDUA mengenai penayangan kegiatan pada platform digital;
- e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 **CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA akan mengirimkan dokumen pengajuan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sekali Pembayaran Selama 1 (satu) Tahun.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sekali bayar untuk sebelas (11) Bulan dari Bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk penayangan atau publikasi pemberitaan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ke Rekening Bank BJB Nomor: 0132684243001 atas nama PT Media Khanza Indonesia.

PASAL 8 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Kerja sama ini dilaksanakan selama tujuh bulan sejak Februari 2023 sampai dengan hingga 31 Desember 2023;
2. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangan surat perjanjian ini hingga 31 Desember 2023.



PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai buni pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat

PASAL 11

LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk Force Majoure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kemenkumham
Papua.

Pihak Kedua

PT Media Khanza Indonesia


Anthonius M Ayorbaba
NIP.197105151996101001
Kuasa Pengguna Anggaran



Tri Ari Wibowo
Direktur